

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan data penelitian dan hasil pembahasan di atas, peneliti dapat menjelaskan, bahwa :

1. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2014-2016 secara berturut-turut, yakni: Rp602.456.000.000,00, Rp753.332.000.000,00 dan Rp776.118.000.000,00. Kemudian perkembangan Dana Bagi Hasil dari tahun 2014-2016 secara berturut-turut, yakni: Rp179.269.000.000,00, Rp177.790.000.000,00 dan Rp204.309.000.000,00. Kemudian perkembangan Dana Alokasi Umum dari tahun 2014-2016 secara berturut-turut, yakni: Rp6.778.723.000.000,00, Rp7.371.771.000.000,00, dan Rp7.986.152.000.000,00. Kemudian perkembangan Dana Alokasi Khusus dari tahun 2014-2016 secara berturut-turut, yakni: Rp1.035.214.000.000,00, Rp1.561.431.000.000,00, dan Rp2.711.264.000.000,00. Dan perkembangan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun 2014-2016 secara berturut-turut, yakni: Rp1.472.345.000.000,00, Rp1.657.838.000.000,00 dan Rp1.332.853.000.000,00. Sedangkan, perkembangan Belanja Bantuan Sosial dari tahun 2014-2016 secara berturut-turut, yakni: Rp55.050.000.000,00, Rp20.382.000.000,00 dan Rp10.969.000.000,00.

2. Variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran secara parsial tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Bantuan Sosial pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sedangkan, variabel Dana Alokasi Khusus secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Bantuan Sosial pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Bantuan Sosial pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

6.2 Saran

Berdasarkan data penelitian dan hasil pembahasan, peneliti menyarankan hal-hal berikut :

1. Pemberian bantuan sosial oleh pemerintah memiliki tujuan untuk memberikan jaminan sosial bagi penerima bantuan sosial, untuk menanggulangi kemiskinan serta memberikan rehabilitasi sosial sebagai bentuk penanggulangan bencana. Oleh sebab itu, diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat memberikan perhatian lebih terhadap penerima bantuan sosial yang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan sosial, agar

dapat terdaftar dengan baik serta dapat menerima bantuan sosial tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga penerima bantuan sosial dapat memiliki kehidupan yang lebih layak.

2. Bagi peneliti-peneliti berikutnya yang ingin mengadakan penelitian serupa agar dapat mengembangkan hasil penelitian ini, sehingga dapat diketahui lebih dalam mengenai variabel-variabel lain yang mempengaruhi belanja bantuan sosial pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

DAFTAR PUSTAKA

- Amran, dkk. 2014. *Pengaruh Perubahan Pendapatan Asli Daerah, Perubahan Dana Bagi Hasil, dan Perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Perubahan Belanja Bantuan Sosial*. Melalui <https://id.scribd.com/doc/315883689/Pengaruh-Perubahan-PAD-Perubahan-DBH-Dan-Perubahan-SiLPA-Terhadap-Perubahan-Belanja-Bantuan-Sosial> (04/03/2018. 18:26 wita)
- Aninomous. 1974. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintah di Daerah*.
- Anonimous. 2002. *Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*.
- Aninomous. 2004. *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Anonimous. 2005. *Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Anonimous. 2006. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Anonimous. 2007. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Anonimous. 2009. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial*.
- Anonimous. 2010. *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah*.
- Anonimous. 2011. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Anonimous. 2011. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD*.

- Bastian, Indra. 2006. *Sistem Akuntansi Sektor Publik Edisi Kedua*. Jakarta Selatan : Salemba Empat.
- Bastian, Indra. 2006. *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta Selatan : Salemba Empat.
- BPPKAD Provinsi Nusa Tenggara Timur berupa data Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2014-2016.
- Darmastuti, Dewi dan Setyaningrum, Dyah. 2009. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Belanja Bantuan Sosial Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Tahun 2009*. Universitas Indonesia. Melalui <http://sna.akuntansi.unikal.ac.id/makalah/048-ASPAK-08.pdf> (16/02/2018. 11:15 wita)
- Erlina, dkk. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*. Jakarta Selatan : Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2012. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Keempat*. Jakarta Selatan : Salemba Empat.
- Ghozali, Imam. 2009. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang : UNDIP.
- Mahmudi. 2015. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi Ketiga*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Mustoffa, Ardyan Firdausi. 2012. *Karakteristik Pemerintah Daerah yang Mempengaruhi Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial*. Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Melalui <http://publikasi.uniska-kediri.ac.id/data/uniska/CendekiaAkuntansi/Vol4No1Jan2016/Akuntansi-Cendekia-vol4no1jan2016-01.ArdyanFM.pdf> (22/02/2018. 17:46 wita)
- Praptiningsih, Febryani Syawaltika Dwi. 2014. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengalokasian Belanja Bantuan Sosial pada Laporan Keuangan Pemerintah daerah di Pulau Jawa Tahun 2014*. Universitas PGRI Yogyakarta. Melalui <http://repository.upy.ac.id/1292/1/ARTIKEL%20PDF.pdf> (16/02/2018. 11:11 wita)
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung : CV Alfabeta.

Sunyoto, Danang. 2016. *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Bandung : PT Refika Aditama.

Supranto, J. 2000. *Statistik Teori dan Aplikasi Jilid 1 Edisi*. Jakarta : Erlangga.

Tika. 2005. *Metode Penelitian Akuntansi*. Jakarta : Bumi Aksara.

<https://www.kemsos.go.id/content/bantuan-sosial>

https://www.kompasiana.com/jemsman/jokowi-serius-memerhatikan-masa-depan-ntt-sebagai-propinsi-tertinggal-di-tanah-air_57dae760f37e610d4f3fa3ec